Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Kota Pasuruan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LKJIP 2025

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun 2025 telah disusun sesuai rencana, guna memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2025.

Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKJIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerjanya.

Dengan tersusunnya dokumen ini, diucapkan terima kasih kepada tim penyusunan LKJIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dan para pelaksana kegiatan serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Harapan kita semua tentunya penyusunan LKJIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik tahun ini, benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik di tahun selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara pemerintahan daerah untuk mewujudkan visi – misi Pemerintah Kota Pasuruan.

Demikian semoga dokumen LKJIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2025 dapat memberikan manfaat bagi kita semua, Aamiin.

Pasuruan, 11 Februari 2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA PASURUAN

IMAM SUBEKTI, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19730709 199201 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan kinerja di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun 2025. Laporan ini disusun untuk memenuhi amanah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah yang pada laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029 dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan memiliki peran strategis dalam pembangunan TIK, menyediakan infrastruktur TIK, pengelolaan data dan statistik secara sektoral, keamanan informasi dan persandian serta menyebarluaskan informasi di Kota Pasuruan. Penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (good governance) memiliki 3 (tiga) landasan utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai dalam Tahun 2025 dengan alat ukur 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum kinerja dapat berhasil dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Tujuan 1** : Digitalisasi tata kelola pemerintahan.

   Indikator : Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, target Tahun 2025 4,12 sedangkan realisasi di Tahun 2025 4,07 sehingga capaian di Tahun 2025 98,79%.

2. **Sasaran 1** : Meningkatnya tata kelola digitalisasi pelayanan publik.

   Indikator : Nilai domain tata kelola SPBE, target Tahun 2025 3,42 sedangkan realisasi di Tahun 2025 3,40 sehingga capaian di Tahun 2025 99,42%.

3. **Sasaran 2** : Meningkatnya layanan digitalisasi pelayanan publik.

   Indikator : Nilai domain layanan SPBE, target Tahun 2025 4,73 sedangkan realisasi di Tahun 2025 4,70 sehingga capaian di Tahun 2025 99,37%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
IKHTISAR EKSEKUTIF ii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR GAMBAR viii
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi 1
1.2.1 Isu Strategis 1
1.2.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja 2
1.2.3 Dukungan SDM 3
1.2.4 Sarana Prasarana 4
1.2.5 Anggaran 5
1.3 Dasar Hukum 5
1.4 Sistematika Laporan Kinerja 7
1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025 7
1.6 Langkah Perbaikan Internal PD atas Rekomendasi LKJIP 2024 8
PERENCANAAN KINERJA 9
2.1 Tujuan dan Sasaran dan Indikator Kinerja Lima Tahun Terakhir Perangkat Daerah 9
2.1.1 Strategi dan Arah Kebijakan 9
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2025 12
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 13
2.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja 23
AKUNTABILITAS KINERJA 26
3.1 Capaian Kinerja 26
3.1.1 Skala Capaian Kinerja 26

3.1.2 Membandingkan antara Target dan Realisasi Tahun Pelaporan 26
3.1.3 Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir 28
3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi 30
3.1.5 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional 31
3.1.6 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan 32
3.1.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 35
3.1.8 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja 36
3.2 Realisasi Anggaran 42
3.3 Inovasi 44
3.4 Penghargaan 44
PENUTUP 46
4.1 Kesimpulan 46
4.2 Rekomendasi 47

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan 3

Tabel 1.2 Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan 4

Tabel 1.3 Perbandingan Anggaran Tahun n-1 (2024) dan Tahun n (2025) 5

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 9

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 10

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan 10

Tabel 2.4 Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan 11

Tabel 2.5 Rencana Kinerja Tahun 2025 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan 12

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun 2025 13

Tabel 2.7 Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan 14

Tabel 2.8 Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun 2025 18

Tabel 2.9 Perubahan Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan 19

Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja 26

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025 26

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Th 2025 dengan Tahun Sebelumnya 28

Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis 30

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/ Kota 31

Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi 32

Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran 36
Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan 37
Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan 42
Tabel 3.10 Daftar Penghargaan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan 44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan 3

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) memiliki 3 (tiga) landasan utama yaitu Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kewajiban organisasi maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan dalam melaksanakan tugas pokok perlu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di akhir tahun pelaksanaan kinerja selama tahun 2025 sesuai dengan program/kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2025, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan sarana pengukuran dan evaluasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan sebagai tolak ukur dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat di bidang komunikasi dan informasi dan bidang statitik. Untuk mencapai hasil (*outcome*) yang optimal, maka program Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dianggarkan melalui P-APBD/APBD Tahun 2025.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

1.2.1 Isu Strategis

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan melaksanakan pengelolaan teknologi informasi yang meliputi telekomunikasi, dunia penyiaran (broadcasting) dan internet. Saat ini teknologi informasi adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Sehingga dalam rentang waktu 2025-2029 perlu diprioritaskan pembangunan dan pengembangan teknologi informasi agar masyarakat dapat memperoleh kemudahan dalam memanfaatkan dunia digital. Permasalahan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah:

1. Kurangnya pemahaman tentang teknologi digital dapat menghambat penerimaan dan penggunaan solusi digital;
2. Adanya aplikasi pusat yang tidak sesuai dengan kebutuhan daerah;

3. Meningkatnya ancaman keamanan siber;
4. Meningkatnya penyebaran disinformasi dan hoaks; dan
5. Rendahnya kualitas data statistik.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka isu strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah sebagai berikut:

1. Pengarusutamaan gender dalam pemanfaatan teknologi digital melalui kecerdasan buatan, analitik data dan teknologi terkini lainnya;
2. Peningkatan aplikasi terintegrasi;
3. Peningkatan keamanan siber untuk melindungi sistem dan data kritis;
4. Pemanfaatan media sosial secara efektif dalam menyebarkan informasi; dan
5. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kualitas data dan analisis statistik.

1.2.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Dalam Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika, serta bidang statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik mempunyai fungsi:

a. penyusunan perencanaan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
b. perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
d. pembinaan, koordinasi, pengendalian, dan fasilitasi pelaksanaan urusan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian; dan

f. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan dapat digambarkan sebagaimana gambar berikut ini:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan

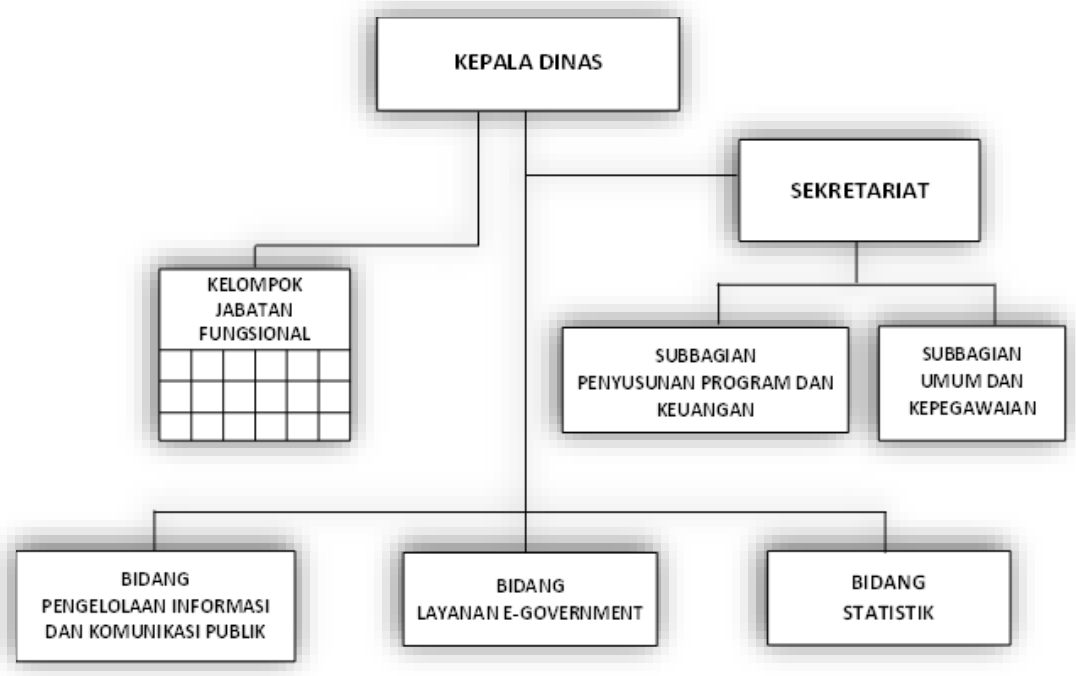

Sumber: Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 17 Tahun 2022

1.2.3 Dukungan SDM

Dalam menjalankan fungsi untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik di dukung oleh 34 ASN dengan komposisi PNS 28 orang dan PPPK 6 orang. Adapun jumlah pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1 Data Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan

No	Uraian	Jumlah Pegawai		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kondisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan			
	SMA	2	2	4
	Diploma I/II/III/IV	6	1	7
	Sarjana (S1)	15	3	18
	Magister (S2)	3	2	5

No	Uraian	Jumlah Pegawai		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
2	Kondisi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan			
	PNS:			
	- Golongan I			
	- Golongan II	6	3	9
	- Golongan III	10	2	12
	- Golongan IV	4	3	7
	PPPK:			
	- Golongan V	1	-	1
	- Golongan VII	1	-	1
	- Golongan IX	4	-	4
3	Kondisi Pegawai Berdasarkan Jabatan			
	Eselon II	1	-	1
	Eselon III	2	2	4
	Eselon IV	-	1	1

Sumber : Data Simaskot Tahun 2024

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan perlu adanya peningkatan kompetensi atau kemampuan dalam bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian. ASN yang selalu meningkatkan kompetensinya dapat menjaga profesionalisme dan citra positif pemerintah di mata masyarakat. ASN pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan telah melakukan peningkatan kemampuan melalui pendidikan, pelatihan, bimtek, dan seminar.

1.2.4 Sarana Prasarana

Sumberdaya Aset/Modal yang dimiliki Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan

No	Kode Barang	Uraian	Nilai Aset
(1)	(2)	(3)	(5)
1.	**1.3**	**Aset Tetap**	**17.038.583.765**
2.	1.3.2	Peralatan dan Mesin	14.854.777.761
3.	1.3.2.01	Alat Besar	771.140.492
4.	1.3.2.02	Alat Angkutan	1.215.290.577
5.	1.3.2.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.655.000
6.	1.3.2.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.323.248.358
7.	1.3.2.06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	4.496.186.127

No	Kode Barang	Uraian	Nilai Aset
8.	1.3.2.10	Komputer	4.046.257.207
9.	1.3.3	Gedung dan Bangunan	2.002.011.994
10.	1.3.3.01	Bangunan Gedung	2.002.011.994
11.	1.3.4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	181.794.010
12.	1.3.4.03	Instalasi	42.056.810
13.	1.3.4.04	Jaringan	139.737.200
14.	**1.5**	**Aset Lainnya**	**2.289.699.458**
15.	1.5.3	Aset Tidak Berwujud	823.352.500
16.	1.5.3.01	Aset Tidak Berwujud	823.352.500
17.	1.5.4	Aset Lain-Lain	1.466.346.958
18.	1.5.4.01	Aset Lain-Lain	1.466.346.958

Sumber: Rekapitulasi Mutasi Barang Tahun 2025

1.2.5 Anggaran

Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun 2025 bersumber dari APBD Kota Pasuruan dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp16.026.561.503. Akan tetapi terdapat perubahan anggaran pada bulan September, sehingga jumlah pagu anggaran menjadi Rp16.010.297.888. Jika dibandingkan dengan pagu anggaran tahun kemarin, terdapat penurunan anggaran sebesar Rp16.263.615 seperti tabel dibawah ini:

Tabel 1.3 Perbandingan Anggaran Tahun n-1 (2024) dan Tahun n (2025)

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD	2024	Rp18.192.658.277
APBD	2025	Rp16.010.297.888

Sumber : DPPA 2024 dan DPPA 2025

1.3 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan disusun dengan landasan hukum:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang telah mengalami beberapa perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas uandang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerjadan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengalami perubahan dengan PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Wali kota Pasuruan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

1.4 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2025 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama *(strategic issued)* yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

DAFTAR LAMPIRAN

1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi SAKIP Tahun 2025 berdasarkan surat Inspektorat Kota Pasuruan nomor 700.1.2.1/674/423.300/LHE/2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan. Adapun rekomendasi Hasil Evalasi SAKIP 2025 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan analisa yang memadai atas target kinerja yang ditetapkan dengan memperhatikan realisasi tahun sebelumnya dan target rencana jangka menengah perangkat daerah;

   Tindak Lanjut:

   Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan telah menyusun kertas kerja analisa perbandingan capaian kinerja tahun sebelumnya.

2. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal perangkat daerah melalui monitoring evaluasi kinerja secara berkala untuk memastikan target kinerja dapat tercapai.

   Tindak Lanjut:

   Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan telah menyusun laporan monitoring dan evaluasi capaian kinerja pada tribulan III dan melakukan analisa atas target kinerja yang belum tercapai.

1.6 Langkah Perbaikan Internal PD atas Rekomendasi LKJIP 2024

Laporan kinerja instansi pemerintah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun 2024 tidak ada rekomendasi dari Inspektorat Kota Pasuruan.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran dan Indikator Kinerja Lima Tahun Terakhir Perangkat Daerah

2.1.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Melalui formulasi rumusan tujuan dalam Rencana Strategis, maka Diskominfo dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan visi dan misi, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) Program Perangkat Daerah.

Perumusan tujuan memiliki keterkaitan erat dengan pertanggungjawaban pencapaiannya. Tujuan yang dirumuskan harus computable agar upaya pertanggung jawabannya dapat tercapai secara obyektif dan terukur.

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Tujuan 1 Integrasi Digitalisasi pada Pelayanan Publik	Persentase Aplikasi yang Terintegrasi	30%	50%	65%	70%	90%
	Sasaran 1 Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	60	70	80	80	90
	Sasaran 2 Terwujudnya Satu Data Pembangunan Kota Pasuruan	Persentase Data Statistik yang Terintegrasi	60%	65%	70%	75%	80%
	Sasaran 3 Meningkatnya Maturitas Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Tata Kelola SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE	2,60	2,70	2,80	2,85	2,90
		Indeks Layanan SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE	2,60	2,70	2,80	2,85	2,90

Tahun 2025 merupakan peralihan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan periode Tahun 2021-2026 menuju RPJMD 2025-2029. Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2025-2029. Untuk tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 dapat

dilihat pada tabel 2.1 dan untuk Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Tujuan 1 Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Indeks SPBE	4,12	1,71 – 1,96	1,81 – 2,1	1,91 – 2,25	2,01 – 2,39	2,11 – 2,54
	Sasaran 1 Meningkatnya Tata Kelola Digitalisasi Pelayanan Publik	Nilai Domain Tata Kelola SPBE	3,42	1,8	1,85	1,95	2,1	2,2
	Sasaran 2 Meningkatnya Layanan Digitalisasi Pelayanan Publik	Nilai Domain Layanan SPBE	4,73	1,8	1,85	1,95	2,1	2,2

Sumber : Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun 2025-2029

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun 2025-2029.

Adapun Indikator kinerja utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Integrasi Digitalisasi pada Pelayanan Publik	1.1	Persentase aplikasi yang terintegrasi	%	Merupakan persentase aplikasi yang terintegrasi	= Jumlah aplikasi terintegrasi/ jumlah aplikasi yang direncanakan untuk integrasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Bidang Layanan e-Government
2.	Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik	2.1	Indeks keterbukaan informasi publik	poin	Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;	nilai indeks keterbukaan informasi publik	Kemendagri
3.	Terwujudnya satu data pembangunan Kota Pasuruan	3.1	Persentase data statistik yang terintegrasi	%	Mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi	= Jumlah data statistik yang terintegrasi/ jumlah data statistik	Perangkat daerah

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
					sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan		
4.	Meningkatnya maturitas implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4.1	Indeks tata kelola SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE	poin	Tata Kelola SPBE merupakan kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu	Nilai Indeks tata kelola SPBE tahun-n	Kemenpan
		4.2	Indeks layanan SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE	poin	Layanan SPBE merupakan keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat	Nilai Indeks Layanan SPBE tahun - n	Kemenpan

Sumber: Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun 2025

Pada tanggal 2 bulan Juli tahun 2025 dilaksanakan Perubahan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 dikarenakan adanya peralihan Renstra periode Tahun 2021-2026 menuju Renstra 2025-2029, yang dituangkan pada tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4 Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan	1.1	Indeks SPBE	Indeks	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE	Nilai Indeks SPBE Tahun - n	Kemenpan
2.	Meningkatnya Tata Kelola Digitalisasi Pelayanan Publik	2.1	Nilai Domain Tata Kelola SPBE	Nilai	Tata Kelola SPBE merupakan kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu	Nilai Domain Tata Kelola SPBE Tahun - n	Kemenpan
3.	Meningkatnya Layanan Digitalisasi Pelayanan Publik	3.1	Nilai Domain Layanan SPBE	Nilai	Layanan SPBE merupakan keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat	Nilai Domain Layanan SPBE Tahun - n	Kemenpan

Sumber: Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun 2025

Perubahan tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Pasuruan Periode Tahun 2021–2026 ke 2025–2029 mencerminkan pergeseran

fokus dari integrasi digitalisasi pelayanan publik menuju penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital. Pada periode Tahun 2021-2026, orientasi utama adalah membangun fondasi digitalisasi pelayanan publik. Fokusnya pada transparansi informasi, konsolidasi data pembangunan, serta peningkatan tingkat kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Artinya, pemerintah berupaya menyiapkan infrastruktur, sistem, dan budaya kerja digital agar pelayanan publik lebih terbuka, terintegrasi, dan efisien.

Pada periode Tahun 2025-2029, arah kebijakan bergeser dari sekadar integrasi menuju penguatan tata kelola. Digitalisasi tidak lagi hanya dipandang sebagai alat untuk membuka akses informasi, tetapi sebagai mekanisme inti dalam mengelola pemerintahan. Sasaran yang ditetapkan lebih menekankan pada kualitas tata kelola digital dan peningkatan layanan publik yang berbasis digital. Dengan demikian, transformasi yang dilakukan bukan sekadar teknis, tetapi juga manajerial. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan berupaya memastikan bahwa digitalisasi benar-benar menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan, sehingga pelayanan publik tidak hanya transparan dan terintegrasi, tetapi juga lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2025

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai program dan kegiatan tahunan. Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Rencana kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5 Rencana Kinerja Tahun 2025 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Tata Kelola Digitalisasi Pelayanan Publik	Nilai Domain Tata Kelola SPBE	Nilai	3,42
		Meningkatnya Layanan Digitalisasi Pelayanan Publik	Nilai Domain Layanan SPBE	Nilai	4,73

Sumber : Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun 2025

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Apara-tur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Sebagai wujud pernyataan komitmen atau tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya, maka rencana kinerja tahunan ditetapkan sebagai penetapan Perangkat Daerah dengan rumusan program kegiatan yang akan dilaksanakan.

Tujuan dibuatnya Penetapan Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Dalam Perjanjian Kinerja terdapat penyataan kesepakatan kinerja yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab. Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun 2025, secara rinci pada tabel 2.5 berikut ini:

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik.	Indeks keterbukaan informasi publik	94,80 poin
2.	Terwujudnya satu data pembangunan Kota Pasuruan	Persentase data statistik yang terintegrasi	75%
3.	Meningkatnya maturitas implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Tata Kelola SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE	3,45 poin
		Indeks Layanan SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE	4,75 poin

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun 2025

Program	Anggaran
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.028.646.997

Program		Anggaran	
2.	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Rp	1.892.302.006
3.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp	7.811.057.700
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp	212.897.400
5.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp	81.657.400

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan pada Tahun Anggaran 2025 telah melaksanakan 5 (lima) program, 11 (sebelas) kegiatan, dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan yang didukung oleh APBD Pemerintah Kota sebesar Rp16.026.561.503,- yang dituangkan pada table 2.6 berikut:

Tabel 2.7 Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp
1	2	3	4	5	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**	**%**	**90**	**6.028.646.997**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu**	**%**	**80**	**12.682.000**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	7	8.522.700
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	4.159.300
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu**	**%**	**80**	**5.017.146.847**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	34	4.984.742.247
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Laporan	13	32.404.600

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp
1	2	3	4	5	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu**	**%**	**70**	**14.694.700**
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	2	2.359.300
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	4	12.335.400
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya**	**%**	**70**	**41.000.000**
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	4	5.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	8	36.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran**	**%**	**85**	**215.210.100**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	2	7.000.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	4	8.700.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	2	2.204.400
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	10.011.600
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	11.334.400
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	125	175.959.700
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**%**	**85**	**398.734.150**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12	4.990.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	178.586.200

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp
1	2	3	4	5	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	215.157.950
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**%**	**70**	**329.179.200**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	1	44.870.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	14	151.060.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan kantor yang terpelihara	jenis	49	33.250.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	buah	1	99.999.200
2	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase informasi PD yang di unggah**	%	**80**	**1.892.302.006**
		Persentase informasi yang dipublikasikan melalui media	%	**90**	
		Persentase informasi berbasis masyarakat yang dibina	%	**85**	
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase informasi pembangunan yang dipublikasikan melalui media massa tepat waktu**	**%**	**85**	**1.892.302.006**
	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Laporan	4	712.896.500
	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Komunitas	10	26.776.900
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	6	288.754.000
	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Rekomendasi	2	376.921.700

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp
1	2	3	4	5	
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media	2	486.952.906
3	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase peningkatan aplikasi yang terintegrasi**	**%**	**15**	**7.811.057.700**
		Persentase layanan jaringan yang ditindaklanjuti	**%**	**100**	
		Persentase pengamanan informasi dan dokumen publik	**%**	**85**	
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase ketercapaian pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota**	**%**	**85**	**7.811.057.700**
	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	Dokumen	1	130.196.500
	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aplikasi	10	1.084.921.800
	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	418	6.595.939.400
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Persentase layanan keamanan informasi dan persandian**	**%**	**9**	**81.657.400**
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah aplikasi yang tersertifikasi elektronik di lingkungan pemerintah daerah**	**aplikasi**	**9**	**81.657.400**
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	PD	41	81.657.400
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase data statistik sektoral yang di publikasi**	**%**	**80**	**212.897.400**
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Jenis Data yang Disusun dalam Data Pokok Pembangunan daerah**	**OPD**	**33**	**212.897.400**
		Jumlah Jenis Data yang Disusun dalam Profil Pembangunan daerah	**OPD**	**33**	
		Persentase data statistik sektoral yang diunggah di website	**%**	**70**	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp
1	2	3	4	5	
	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	Persentase	75	37.065.500
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Dokumen	3	175.831.900

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun 2025

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 3 bulan September tahun 2025 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 mengalami penyesuaian mendasar seiring dengan adanya peralihan Rencana Strategis (Renstra) dari periode 2021–2026 menuju Renstra baru periode 2025–2029. Perubahan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan keselarasan antara arah kebijakan jangka menengah organisasi dengan target tahunan yang disepakati. Dengan adanya perubahan ini, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 tidak hanya menjadi kontrak kerja tahunan, tetapi juga instrumen transisi yang menghubungkan pencapaian Renstra lama dengan arah kebijakan baru. Penyesuaian ini diharapkan mampu memperkuat komitmen organisasi dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan untuk periode 2025–2029.

Tabel 2.8 Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Tata Kelola Digitalisasi Pelayanan Publik	Nilai Domain Tata Kelola SPBE	3,45	3,42
2.	Meningkatnya Layanan Digitalisasi Pelayanan Publik	Nilai Domain Layanan SPBE	4,75	4,73

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun 2025

Pada tanggal 18 bulan September tahun 2025 dilaksanakan perubahan perjanjian kinerja yang kedua dikarenakan terdapat perubahan anggaran dan tanpa merubah target indikator. Perubahan perjanjian kinerja tersebut dituangkan pada tabel 2.7.

Program		Anggaran			
		Sebelum		Sesudah	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	6.028.646.997	Rp	6.007.180.523
2.	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Rp	1.892.302.006	Rp	2.152.479.099
3.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp	7.811.057.700	Rp	7.634.579.900
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp	212.897.400	Rp	156.717.266
5.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp	81.657.400	Rp	59.341.100

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan pada Tahun Anggaran 2025 telah melaksanakan 5 (lima) program, 11 (sebelas) kegiatan, dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan yang didukung oleh APBD Pemerintah Kota sebesar Rp16.010.297.888,- yang dituangkan pada tabel 2.8 berikut :

Tabel 2.9 Perubahan Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp
1	2	3	4	5	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**	**%**	**90**	**6.007.180.523**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu**	**%**	**80**	**6.176.200**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	7	3.947.700

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp
1	2	3	4	5	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	2.228.500
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu**	**%**	**80**	**5.242.140.623**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	36	5.215.273.323
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Laporan	13	26.867.300
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu**	**%**	**70**	**11.242.100**
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	2	1.032.500
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	4	10.209.600
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya**	**%**	**70**	**16.223.600**
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	4	2.223.600
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	2	14.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran**	**%**	**85**	**109.392.150**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	2	6.300.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	4	4.283.500
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	2	1.102.200
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	4.105.800

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp
1	2	3	4	5	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	5.620.800
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	125	87.979.850
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**%**	**85**	**392.452.250**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12	2.490.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	178.586.200
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	211.376.050
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**%**	**70**	**229.553.600**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	1	36.396.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	14	122.368.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan kantor yang terpelihara	jenis	49	20.790.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	buah	1	49.999.600
2	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase informasi PD yang di unggah**	%	**80**	**2.152.479.099**
		Persentase informasi yang dipublikasikan melalui media	%	**90**	
		Persentase informasi berbasis masyarakat yang dibina	%	**85**	
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase informasi pembangunan yang dipublikasikan melalui media massa tepat waktu**	**%**	**85**	**2.152.479.099**
	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan	Laporan	4	867.892.500

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp
1	2	3	4	5	
		3. aktif dalam kegiatan relasi media			
	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Komunitas	10	15.450.700
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	6	240.351.709
	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Rekomendasi	2	371.626.700
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media	2	657.157.490
3	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase peningkatan aplikasi yang terintegrasi**	**%**	**69**	**7.634.579.900**
		Persentase layanan jaringan yang ditindaklanjuti	**%**	**100**	
		Persentase pengamanan informasi dan dokumen publik	**%**	**85**	
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase ketercapaian pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota**	**%**	**85**	**7.634.579.900**
	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	Dokumen	1	94.957.000
	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aplikasi	10	1.352.417.100
	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	418	6.187.205.800
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Persentase layanan keamanan informasi dan persandian**	**%**	**100**	**59.341.100**
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	**Jumlah aplikasi yang tersertifikasi elektronik di lingkungan pemerintah daerah**	**aplikasi**	**9**	**59.341.100**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp
1	2	3	4	5	
	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	PD	41	59.341.100
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase data statistik sektoral yang di publikasi**	**%**	**80**	**156.717.266**
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Jenis Data yang Disusun dalam Data Pokok Pembangunan daerah**	**OPD**	**33**	**156.717.266**
		Jumlah Jenis Data yang Disusun dalam Profil Pembangunan daerah	**OPD**	**33**	
		Persentase data statistik sektoral yang diunggah di website	**%**	**70**	
	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	Persentase	75	22.293.298
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Dokumen	2	134.423.968

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun 2025

2.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Dalam upaya pencapaian kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan memanfaatkan beberapa instrumen pendukung berbasis sistem informasi. Adapun sistem informasi yang digunakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan sebagai instrumen pendukung capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Aplikasi SP4N-Lapor!

SP4N LAPOR! adalah Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional/ Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat. Aplikasi SP4N-LAPOR dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). SP4N LAPOR! akan menjadi aplikasi pengelola pengaduan di seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.



2. Aplikasi E-Sambat



Aplikasi E-Sambat adalah aplikasi pengaduan masyarakat Kota Pasuruan yang dapat digunakan untuk menyampaikan keluhan, aspirasi, dan saran. Aplikasi ini dapat diakses secara online dan gratis. Aplikasi E-Sambat merupakan salah satu bentuk inovasi digital yang dapat mendukung kuali- tas pelayanan publik. Sesuai dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 70 Tahun 2022 tentang pelayanan penanganan pengaduan online masyarakat di lingkungan pemerintah kota pasuruan.

3. Layanan Pengaduan 112



Layanan pengaduan 112 adalah layanan panggilan darurat yang dapat digunakan untuk meminta pertolongan dalam keadaan darurat. Layanan ini dapat digunakan untuk berbagai situasi darurat, seperti kebakaran, kecelakaan, bencana alam, dan lainnya. Layanan 112 merupakan layanan publik yang gratis dan dapat diakses 24 jam. Layanan ini dapat dihubungi melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Layanan 112 mempermudah masyarakat mengingat nomor darurat, mempercepat penanggulangan keadaan darurat, mempermudah koordinasi antar instansi terkait. Cara menghubungi layanan 112: Tekan tombol panggilan darurat atau emergency call di ponsel, Tekan digit 112.

4. Aplikasi Literasi SPBE



Literasi SPBE adalah salah satu faktor yang dapat memengaruhi kesusksesan penerapan SPBE. Literasi digital yang rendah dapat menjadi kendala dalam penerapan SPBE. Hal ini merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, pegawai ASN, dan pelaku usaha tentang SPBE. Tujuannya agar pemanfaatan SPBE dapat optimal.

5. PPID



Aplikasi PPID adalah aplikasi yang digunakan untuk mengelola dan melayani informasi publik yang dimiliki oleh badan publik. PPID merupakan singkatan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. PPID bertanggung

jawab untuk menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan melayani informasi publik. Aplikasi PPID dapat digunakan untuk: mencari dan mengakses informasi publik, memohon informasi publik secara online, melihat dan mengunduh dokumen yang telah tersedia, memproduksi laporan pelayanan informasi publik.

6. Satu Data

Aplikasi Satu Data Kota Pasuruan adalah portal data yang menyajikan data resmi dan akurat untuk membantu pengambilan keputusan. Aplikasi satu data merupakan pendukung pencapaian tujuan pembangunan dengan memastikan bahwa kinerja organisasi berjalan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan.



7. Aplikasi Network Monitoring System (NMS)

Aplikasi Network Monitoring System (NMS) yaitu sistem yang digunakan untuk memantau kondisi jaringan computer. NMS dapat membantu administrator jaringan untuk mengetahui kondisi jaringan secara berkala dan terpusat. NMS dapat memberikan data kondisi jaringan dalam bentuk grafik atau angka. Data ini dapat membantu untuk mengetahui dimana perlu dilakukan penyesuaian.



8. Aplikasi Siem

Aplikasi Siem merpakan aplikasi monitoring aktivitas siber pada jaringan dan sistem aplikasi. Aplikasi ini dapa mengumpulkan dan menganalisis log dari server, aplikasi, dan perangkat jaringan. Selain itu juga dapat memantau aktivitas mencurigakan dan serangan di sistem serta melindungi perangkat dengan deteksi malware dan memantau perubahan file penting.



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90
3	Sedang	66 ≤ 75
4	Rendah	51 ≤ 65
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017*

3.1.2 Membandingkan antara Target dan Realisasi Tahun Pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun 2025 menunjukkan hasil sesuai pada table 3.2 berikut :

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Tata Kelola Digitalisasi Pelayanan Publik	Nilai Domain Tata Kelola SPBE	3,42	3,40	99,42	Sangat Tinggi	Kemenpan RB
2.	Meningkatnya Layanan Digitalisasi Pelayanan Publik	Nilai Domain Layanan SPBE	4,73	4,70	99,37	Sangat Tinggi	Kemenpan RB

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan

1. Sasaran "Meningkatnya Tata Kelola Digitalisasi Pelayanan Publik"

Pada tahun pelaporan, indikator nilai domain tata kelola SPBE ditetapkan dengan target sebesar 3,42. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa realisasi capaian berada pada angka 3,40, atau sedikit di bawah target yang telah ditentukan. Dengan demikian, tingkat capaian yang diperoleh adalah 99,42% dari target.

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Nilai Domain Tata Kelola SPBE	3,42	3,40	99,42

Perbandingan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tata kelola SPBE telah berjalan sangat mendekati target, dengan selisih yang relatif kecil yaitu 0,02 poin. Hal ini mencerminkan bahwa kebijakan, perencanaan, kelembagaan, serta mekanisme pengendalian SPBE telah diimplementasikan secara konsisten, meskipun masih terdapat ruang perbaikan untuk mencapai target penuh.

Secara umum, capaian 99,42% dapat dikategorikan sebagai sangat baik, karena hampir seluruh indikator tata kelola SPBE terpenuhi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Namun, pencapaian ini juga menjadi dorongan untuk melakukan peningkatan kualitas tata kelola, khususnya pada aspek yang masih belum optimal, agar target di tahun berikutnya dapat tercapai bahkan melampaui.

2. Sasaran "Meningkatnya Layanan Digitalisasi Pelayanan Publik"

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Nilai Domain Layanan SPBE	4,73	4,70	99,37

Tabel diatas menunjukkan bahwa indikator nilai domain layanan SPBE ditetapkan dengan target sebesar 4,73. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa realisasi capaian berada pada angka 4,70, atau sedikit di bawah target yang telah ditentukan. Dengan demikian, tingkat capaian yang diperoleh adalah 99,37% dari target.

Perbandingan ini memperlihatkan bahwa penyelenggaraan layanan SPBE telah berjalan sangat mendekati target, dengan selisih yang relatif kecil yaitu 0,03 poin. Hal ini

mencerminkan bahwa kualitas layanan digital yang diberikan kepada masyarakat maupun internal pemerintahan sudah berada pada level yang sangat baik, meskipun masih terdapat ruang perbaikan untuk mencapai target penuh.

Secara umum, capaian 99,37% dapat dikategorikan sebagai sangat tinggi, karena hampir seluruh indikator layanan SPBE terpenuhi sesuai standar yang ditetapkan. Namun, pencapaian ini juga menjadi momentum untuk terus meningkatkan kualitas layanan digital, khususnya pada aspek yang masih belum optimal, agar target di tahun berikutnya dapat tercapai bahkan melampaui.

3.1.3 Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau Tahun 2024 diuraikan pada tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Indeks SPBE	3,62	4,07	4,12	4,07	98,79
2.	Meningkatnya Tata Kelola Digitalisasi Pelayanan Publik	Nilai Domain Tata Kelola SPBE	2,90	3,40	3,42	3,40	99,42
3.	Meningkatnya Layanan Digitalisasi Pelayanan Publik	Nilai Domain Layanan SPBE	4,38	4,70	4,73	4,70	99,37

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan

Dalam tiga tahun terakhir, perkembangan Indeks SPBE menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dan positif. Pada tahun 2023, nilai realisasi indeks SPBE tercatat sebesar 3,62, yang mencerminkan bahwa penyelenggaraan SPBE masih berada pada tahap penguatan dengan berbagai aspek yang perlu ditingkatkan, baik dari sisi tata kelola maupun layanan digital.

Memasuki tahun 2024, terjadi peningkatan signifikan dengan nilai realisasi mencapai 4,07. Lonjakan sebesar 0,45 poin dibanding tahun sebelumnya menandakan adanya perbaikan nyata dalam implementasi kebijakan, integrasi sistem, serta kualitas layanan digital yang diberikan kepada masyarakat dan internal pemerintahan. Peningkatan ini sekaligus menunjukkan bahwa SPBE telah bergerak menuju level yang lebih matang dan terstandarisasi.

Pada tahun 2025, nilai realisasi indeks SPBE tetap berada pada angka 4,07 dengan capaian 98,79%. Namun, perlu dicatat bahwa pada tahun tersebut Kementerian PANRB tidak melakukan penilaian SPBE secara langsung, sehingga angka realisasi yang digunakan merupakan hasil adopsi dari penilaian tahun 2024. Stabilitas ini menunjukkan bahwa kinerja SPBE berhasil dipertahankan pada level yang tinggi, meskipun tidak ada evaluasi baru yang dilakukan.

Sedangkan domain tata kelola SPBE Pada tahun 2023 berada pada angka 2,90, yang mencerminkan tahap penguatan awal dengan berbagai aspek tata kelola yang perlu ditingkatkan. Namun, pada tahun 2024 terjadi lonjakan signifikan dengan nilai realisasi mencapai 3,40, menandakan adanya perbaikan nyata dalam kebijakan, perencanaan, kelembagaan, serta mekanisme pengendalian. Peningkatan ini kemudian berhasil dipertahankan pada tahun 2025 dengan nilai realisasi tetap 3,40 dan capaian 99,42%, meskipun pada tahun tersebut Kementerian PANRB tidak melakukan penilaian SPBE sehingga angka yang digunakan merupakan hasil adopsi dari penilaian tahun 2024. Stabilitas ini menunjukkan bahwa tata kelola SPBE telah berada pada level yang relatif tinggi dan konsisten.

Sementara itu, pada domain layanan SPBE terlihat pola perkembangan yang serupa. Tahun 2023 mencatat nilai realisasi sebesar 4,38, yang menunjukkan layanan digital masih dalam tahap pengembangan menuju optimalisasi. Kemudian pada tahun 2024 terjadi peningkatan signifikan dengan nilai realisasi mencapai 4,70, mencerminkan adanya perbaikan kualitas layanan, integrasi sistem, serta peningkatan kepuasan pengguna. Sama halnya dengan domain tata kelola, pada tahun 2025 nilai realisasi tetap berada di angka 4,70 dengan capaian 99,37%, karena tidak dilakukan penilaian baru oleh Kementerian PANRB sehingga angka yang digunakan merupakan hasil dari tahun 2024. Konsistensi ini menegaskan bahwa kualitas layanan SPBE telah mampu dipertahankan pada level yang sangat tinggi.

Jika dilihat secara keseluruhan, tren kinerja SPBE dari tahun 2023 hingga 2025 menunjukkan lonjakan signifikan pada tahun 2024 baik di domain tata kelola maupun layanan, yang kemudian berhasil dipertahankan secara konsisten pada tahun 2025 dengan capaian mendekati sempurna. Hal ini mencerminkan bahwa upaya penguatan kebijakan, kelembagaan, serta peningkatan kualitas layanan digital telah memberikan hasil nyata, sekaligus menjadi fondasi penting untuk menjaga keberlanjutan kinerja SPBE di tahun-tahun berikutnya.

3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan periode 2025-2029 diuraikan pada table 3.4 berikut :

Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1.	Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Indeks SPBE	4,07	2,11-2,54	455,81
2.	Meningkatnya Tata Kelola Digitalisasi Pelayanan Publik	Nilai Domain Tata Kelola SPBE	3,40	2,2	154,54
4.	Meningkatnya Layanan Digitalisasi Pelayanan Publik	Nilai Domain Layanan SPBE	4,70	2,2	213,63

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan

Sampai dengan tahun 2025, capaian kinerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menunjukkan hasil yang relatif tinggi pada seluruh indikator utama. Nilai Indeks SPBE tahun 2025 tercatat sebesar 4,07 dengan capaian 98,79%, jauh melampaui target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2025–2029, yaitu berada pada kisaran 2,11–2,54. Perbedaan ini terjadi karena mulai tahun 2026, Indeks SPBE akan berubah nomenklatur menjadi Indeks Pemerintahan Digital, dengan komponen penilaian yang mengalami banyak penyesuaian.

Hal serupa juga terlihat pada indikator nilai domain tata kelola SPBE, di mana realisasi tahun 2025 mencapai 3,42, sementara target Renstra tahun 2029 hanya 2,2. Begitu pula

dengan indikator nilai domain layanan SPBE, yang pada tahun 2025 sudah berada di angka 4,70, sedangkan target Renstra tahun 2029 ditetapkan sebesar 2,2.

Perbedaan yang cukup mencolok antara capaian tahun 2025 dengan target jangka menengah bukanlah cerminan penurunan kinerja, melainkan konsekuensi dari adanya perubahan metodologi dan komponen penilaian. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor 000.7.2.2/14242/201.2/2025 tentang Pemutakhiran Penyelarasan Indikator Sasaran Pembangunan dan IUP pada RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025–2029. Surat edaran tersebut menegaskan bahwa indikator SPBE akan disesuaikan dengan standar baru Indeks Pemerintahan Digital, sehingga target jangka menengah terlihat lebih rendah dibanding capaian saat ini.

Dengan demikian, narasi perbandingan ini menunjukkan bahwa capaian tahun 2025 berada jauh di atas target Renstra 2029, namun hal tersebut tidak dapat diartikan sebagai kelebihan mutlak, melainkan harus dipahami dalam konteks perubahan instrumen evaluasi. Ke depan, tantangan utama adalah memastikan bahwa capaian tinggi yang sudah diraih dapat ditransformasikan dan diadaptasikan ke dalam kerangka penilaian baru Indeks Pemerintahan Digital, sehingga konsistensi kinerja tetap terjaga meskipun indikator berubah.

3.1.5 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional diuraikan sesuai table 3.5 berikut :

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Standar Nasional/Provinsi /Kab/Kota	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1.	Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Indeks SPBE	4,07	3,12 Nasional	130,45
2.	Meningkatnya Tata Kelola Digitalisasi Pelayanan Publik	Nilai Domain Tata Kelola SPBE	3,40	2,86 Nasional	118,88
3.	Meningkatnya Layanan Digitalisasi Pelayanan Publik	Nilai Domain Layanan SPBE	4,70	3,00 Nasional	156,67

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan

Pada tahun 2025, capaian kinerja Indeks SPBE menunjukkan angka 4,07, lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi nasional sebesar 3,12. Perbedaan sebesar 0,95 poin ini menegaskan bahwa penerapan SPBE di tingkat instansi telah melampaui standar nasional, mencerminkan efektivitas strategi digitalisasi yang dijalankan.

Untuk nilai domain tata kelola SPBE, realisasi tahun 2025 mencapai 3,42, sedangkan rata-rata nasional berada pada angka 2,86. Selisih 0,56 poin ini menunjukkan bahwa tata kelola SPBE di instansi terkait lebih matang dibandingkan capaian nasional, dengan indikasi adanya perencanaan, koordinasi, serta pengawasan yang lebih baik dalam mendukung transformasi digital pemerintahan.

Sementara itu, pada nilai domain layanan SPBE, capaian tahun 2025 mencapai 4,70, jauh melampaui rata-rata nasional yang hanya 3,00. Perbedaan signifikan sebesar 1,70 poin ini memperlihatkan bahwa kualitas layanan berbasis elektronik yang diberikan instansi telah berada pada level yang lebih unggul, baik dari sisi aksesibilitas, kecepatan, maupun kepuasan pengguna.

Secara keseluruhan, ketiga indikator tersebut memperlihatkan bahwa realisasi kinerja SPBE tahun 2025 berada di atas standar nasional, dengan keunggulan paling menonjol pada domain layanan SPBE. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa instansi telah berhasil membangun ekosistem digital yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

3.1.6 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel 3.6 berikut:

Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Indeks SPBE	4,12	4,07	98,79	belum memiliki kebijakan Audit TIK yang mengatur terkait Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	Menyusun kebijakan Audit TIK yang mengatur

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							secara komprehensif
2.	Meningkatnya Tata Kelola Digitalisasi Pelayanan Publik	Nilai Domain Tata Kelola SPBE	3,42	3,40	99,42	Memastikan koordinasi lintas sektor	Menyusun mekanisme evaluasi kinerja tim koordinasi secara periodik
3.	Meningkatnya Layanan Digitalisasi Pelayanan Publik	Nilai Domain Layanan SPBE	4,73	4,70	99,37	Secara keseluruhan perolehan nilai tingkat kematangan indikator pada domain layanan SPBE telah terpenuhi dengan nilai maksimal, meskipun ada sebagian kecil indikator yang memperoleh nilan minimal	Integrasi antar layanan administrasi dan publik agar tercipta sistem yang lebih terpadu dan mengurangi potensi duplikasi

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan

Dalam pencapaian Indeks SPBE Dinas Komunikasi, Informatika dan Statiistik telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam penerapan SPBE dengan kekuatan di hampir semua aspek, seperti kebijakan internal, teknologi informasi, layanan publik, dan administrasi pemerintahan berbasis elektronik. Namun, untuk lebih meningkatkan kualitas penerapan, perlu diambil langkah strategis, seperti menyusun perencanaan strategis SPBE yang komprehensif terkait rencana dan anggaran, serta memperkuat penerapan manajemen perubahan melalui pedoman dan bukti dukung yang memadai. Selain itu, penting untuk mengembangkan kebijakan audit TIK yang mencakup audit infrastruktur dan keamanan SPBE secara menyeluruh untuk memastikan kelayakan dan keamanan sistem. Dengan langkah-langkah ini, Kota Pasuruan dapat memperkuat posisi sebagai pelopor implementasi SPBE yang optimal.

Pada indikator nilai domain tata kelola SPBE Kota Pasuruan terdapat adanya keberhasilan sekaligus kelemahan yang perlu diperhatikan. Penilaian domain tata Kelola SPBE di dukung oleh 3 komponen penilaian yaitu aspek perencanaan strategis SPBE, aspek

teknologi informasi dan komunikasi, dan aspek penyelenggara SPBE. Pada aspek Perencanaan Strategis SPBE, Kota Pasuruan telah memiliki Arsitektur SPBE serta Inovasi Proses Bisnis SPBE yang menjadi kekuatan utama dalam mendukung transformasi digital. Namun, kelemahan masih terlihat pada ketiadaan perencanaan yang komprehensif terkait Rencana dan Anggaran SPBE, sehingga belum ada bukti dukung yang jelas mengenai pengaturan pembiayaan yang terintegrasi. Kondisi ini berpotensi menghambat keberlanjutan program SPBE jika tidak segera diperbaiki. Alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah menyusun dokumen perencanaan strategis yang terintegrasi dengan pembangunan daerah, memastikan adanya alokasi anggaran khusus SPBE dalam APBD, serta mengembangkan mekanisme pengendalian internal untuk menjamin konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pembiayaan.

Pada aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Kota Pasuruan menunjukkan keberhasilan yang cukup baik dengan adanya pembangunan aplikasi SPBE, layanan pusat data, jaringan intra instansi, serta sistem penghubung layanan antar instansi. Tidak ditemukan kelemahan pada aspek ini, sehingga dapat dikatakan bahwa fondasi teknologi telah dibangun dengan baik. Meski demikian, penguatan tetap diperlukan melalui integrasi antar layanan agar tidak terjadi duplikasi sistem, peningkatan keamanan siber untuk melindungi data publik, serta pemanfaatan teknologi modern seperti cloud computing dan big data analytics guna mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

Sementara itu, pada aspek Penyelenggara SPBE, Kota Pasuruan telah membentuk Tim Koordinasi SPBE dan melakukan kolaborasi penerapan SPBE, yang menjadi kekuatan dalam memastikan koordinasi lintas sektor, sehingga menunjukkan adanya komitmen kelembagaan yang kuat. Untuk memperkuat capaian, alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah memperluas kolaborasi dengan pihak eksternal seperti perguruan tinggi, sektor swasta, dan masyarakat, meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, serta menyusun mekanisme evaluasi kinerja tim koordinasi secara periodik.

Indikator nilai domain layanan SPBE Kota Pasuruan menunjukkan capaian yang cukup baik dengan keberhasilan yang merata pada dua komponen utama, yaitu Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Layanan Publik Berbasis Elektronik. Pada aspek layanan administrasi pemerintahan, Kota Pasuruan telah berhasil menerapkan berbagai layanan penting seperti layanan perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan dinamis, pengelolaan barang milik negara/daerah, pengawasan internal, akuntabilitas kinerja organisasi, serta layanan kinerja pegawai.

Keberadaan layanan-layanan tersebut menjadi kekuatan utama dalam mendukung efisiensi birokrasi dan transparansi tata kelola pemerintahan. Namun masih terdapat 2 layanan yang mendapatkan nilai minimal yaitu layanan pengelolaan barang milik negara/daerah dan layanan pengawasan internal pemerintah. Alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah penyediaan layanan pengelolaan barang milik negara/daerah dan layanan pengawasan internal pemerintah dengan berbasis elektronik dan terintegrasi.

Sementara itu, pada aspek layanan publik berbasis elektronik, Kota Pasuruan juga menunjukkan keberhasilan dengan tersedianya layanan pengaduan pelayanan publik, layanan data terbuka, layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH), serta layanan publik di berbagai sektor. Hal ini memperlihatkan komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan akses layanan yang lebih mudah, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sama halnya dengan layanan administrasi, pada aspek layanan publik berbasis elektronik juga tidak ditemukan kelemahan, sehingga menunjukkan bahwa Kota Pasuruan telah mampu membangun ekosistem layanan digital yang relatif lengkap dan berfungsi dengan baik.

Meskipun tidak terdapat kelemahan yang signifikan, alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah memperkuat integrasi antar layanan administrasi dan publik agar tercipta sistem yang lebih terpadu dan mengurangi potensi duplikasi. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kualitas layanan berbasis pengalaman pengguna (user experience) agar masyarakat semakin mudah memanfaatkan layanan yang tersedia. Kota Pasuruan juga dapat mengembangkan inovasi layanan berbasis teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI) untuk analisis pengaduan publik atau big data untuk pengambilan keputusan berbasis data. Dengan langkah-langkah tersebut, keberhasilan yang sudah dicapai dapat terus ditingkatkan dan memberikan dampak yang lebih besar bagi efektivitas pemerintahan serta kepuasan masyarakat.

3.1.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel 3.7 berikut:

Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan	4,12	4,07	98,79	16.010.297.888	15.148.265.855	94,62	Efisien
2	Meningkatnya Tata Kelola Digitaliasasi Pelayanan Publik	3,42	3,40	99,42	15.794.239.522	14.939.711.756	94,59	Efisien
3	Meningkatnya Layanan Digitalisasi Pelayanan Punlik	4,73	4,70	99,37	216.058.366	208.554.099	96,53	Efisien

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan

Selama tahun 2025 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

a. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM);
b. Sarana dan prasarana kerja seperti penggunaan AC, Listrik, lampu, computer digunakan pada saat jam kerja, dan setelah am kerja selesai langsung dimatikan;
c. Alat tulis kantor digunakan sesuai dengan kebutuhan;
d. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempercepat proses kerja;
e. Beberapa kegiatan surat menyurat dilaksanakan melalui aplikasi srikandi (*paperless*);
f. Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan operasional dilaksanakan rutin dan yang benar-benar perlu pemeliharaan/penggantian suku cadang;
g. Koordinasi dengan kementerian ataupun pemerintah provinsi dengan menggunakan system komunikasi digital;
h. Pemanfaatan pelatihan SDM secara daring yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta.

3.1.8 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel 3.8 dibawah ini:

Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Digitaliasasi Tata Kelolal Pemerintahan	Indeks SPBE	98,79					
1	Meningkatnya Tata Kelola Digitalisasi Pelayanan Publik	Nilai Domain Tata Kelola SPBE	99,42	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase peningkatan aplikasi yang terintegrasi	108,70	Menunjang	Ketercapaian target indikator ini karena kapabilitas programmer aplikasi sebanyak 8 orang
					Persentase layanan jaringan yang ditindaklanjuti	100	Menunjang	Ketercapaian ini didukung oleh kapabilitas SDM IT di lapangan, koordinasi yang baik antara operator pengaduan dengan SDM IT di lapangan, dan berfungsinya SOP layanan pengaduan secara optimal
					Persentase pengamanan informasi dan dokumen publik	117,65	Menunjang	Ketercapaian ini didukung oleh adanya lisensi Firewall sebagai sistem keamanan yang melindungi dokumen publik pada website PD
				Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota	117,65	Menunjang	Ketercapaian ini didukung oleh kapabilitas SDM Programmer yang memadai
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase layanan keamanan informasi dan persandian	100	Menunjang	Ketercapaian ini didukung oleh adanya lisensi Firewall sebagai sistem keamanan yang melindungi komputer dari berbagai ancaman di jaringan internet dam Lisensi SSL untuk melindungi privasi dan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								integritas data interaksi digital pengguna
				Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi yang tersertifikasi elektronik di lingkungan pemerintah daerah	111,11	Menunjang	Ketercapaian ini dikarenakan respon Kementrian Komdigi yang cepat. Sehingga banyak aplikasi yang mendapat persetujuan penerbitan sertifikasi elektronik.
2	Meningkatnya Layanan Digitalisasi Pelayanan Publik	Nilai Domain Layanan SPBE	99,37	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi PD yang di unggah	109,50	Menunjang	Ketercapaian ini dikarenakan kesadaran Perangkat Daerah dalam update informasi di website PD maupun medsos PD
					Persentase informasi yang dipublikasikan melalui media	101,12	Menunjang	Ketercapaian ini didukung dengan kerjasama yang baik dengan media
					Persentase informasi berbasis masyarakat yang dibina	74,32	Menunjang	Hal ini dikarenakan seringnya pergantian pengurus dalam KIM dan tidak didelegasikan pada pengurus yang lain
				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi pembangunan yang dipublikasikan melalui media massa tepat waktu	107,07	Menunjang	Hal ini dikarenakan adanya koordinasi yang baik dengan Perangkat Daerah terkait publikasi
				PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data statistik sektoral yang di publikasi	122,25	Menunjang	Ketercapaian ini didukung oleh adanya penetapan SKB (Surat Keputusan Bersama) daftar data prioritas

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Data yang Disusun dalam Data Pokok Pembangunan daerah	100	Menunjang	Hal ini disebabkan karena komitmen yang kuat pada Perangkat Daerah sehingga tingkat keterisian elemen data statistik sektoral semakin meningkat
					Jumlah Jenis Data yang Disusun dalam Profil Pembangunan daerah	100	Menunjang	Hal ini dikarenakan adanya monitoring secara berkala yang dilakukan oleh Bidang Statistik
					Persentase data statistik sektoral yang diunggah di website	141,79	Menunjang	Hal ini dikarenakan adanya monitoring secara berkala yang dilakukan oleh Bidang Statistik

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan

Untuk mendukung keberhasilan kinerja tujuan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan memiliki 2 sasaran yang didukung oleh 4 program sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Digitaliasi Pelayanan Publik

Untuk mendukung keberhasilan kinerja sasaran meningkatnya tata kelola digitalisasi pelayanan publik, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan melaksanakan program dan beberapa kegiatan sebagai berikut :

Program : 1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
2. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Kegiatan : - Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Tingkat keberhasilan yang telah dicapai antara lain :

a. 39 Aplikasi yang telah diintegrasikan oleh Diskominfo Kota Pasuruan dari 52 aplikasi yang direncanakan terintegrasi pada.
b. Ada 43 aplikasi yang telah di kembangkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan
c. 41 website Perangkat Daerah yang dikelola dan diamankan oleh Diskominfo Kota Pasuruan
d. Tersedianya infrastruktur jaringan sebanyak 469 titik akses internet dengan kecepatan masing-masing titik *Up to* 100 Mbps antara lain :
    - 41 titik akses jaringan di Perangkat Daerah
    - 34 titik akses jaringan di Kelurahan
    - 8 titik akses di Puskesmas
    - 29 titik akses di Puskesmas Pembantu
    - 224 titik akses di RWnet
    - 57 titik akses di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
    - 34 titik akses di Taman / Area Publik (Taman, CCTV Simpang & Area Lainnya)
    - 28 titik akses di UPT (Pasar, TPS & UPT Lainnya)
    - 14 titik akses di Rumah Dinas

Dinas Komunikasi, Informatik dan Statistik Kota Pasuruan telah menjadi Tim CSIRT (Computer Security Incident Response Team) Nasional yang diresmikan BSSN khususnya sektor pemerintah dan pembangunan manusia.

2. Sasaran Meningkatnya Layanan Digitalisasi Pelayanan Publik

Untuk mendukung keberhasilan kinerja sasaran meningkatnya tata kelola digitalisasi pelayanan publik, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan melaksanakan program dan beberapa kegiatan sebagai berikut :

Program : 1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
2. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Kegiatan : 1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
2. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Tingkat keberhasilan yang telah dicapai antara lain :

a. Kerjasama yang baik dengan media antara lain media online, media sosial, media elektronik, media cetak (Radarbromo, Bhirawa, Disway, dan Memorandum, Surya, Jawa Pos, Harian Bangsa, Surabaya Pagi), radio (Radio Ramapati), media online (Wartabromo.com, Kabarpas.com, Bangsaonline.com, Tribunews, kabarbaik, Akurat.com, disway.com, memorandum, Harian nasional, Portal Indonesia, Radar Merah Putih, Kabar Jatim, Kabar Karya, Pantura 7, dan Tugu Jatim), dan TV (JTV dan CNN). Publikasi informasi dimaksud dengan rincian sebagai berikut:

- Publikasi melalui media cetak : 22
- Publikasi melalui media online : 988
- Publikasi melalui media TV : 2
- Publikasi melalui *website* : 852
- Publikasi melalui instagram : 1.972
- Publikasi melalui *live streaming* : 49
- Publikasi melalui *podcast* : 61

Faktor lain pendukung ketercapaian indikator ini adalah adanya koordinasi yang baik dengan Perangkat Daerah terkait publikasi melalui live streaming Ramapati, podcast, dan medsos (IG). Selain itu, tersedianya papan baca sebanyak 13 titik yang tersebar di Kota Pasuruan.

b. Dilaksanakannya kegiatan pelatihan petugas pengolah data statistik pada Perangkat Daerah sampai dengan pengolah data di Bidang. Sehingga SDM Perangkat Daerah dapat memilah serta mengunggah data indikator Perangkat Daerah terkait pada website Satu Data Kota Pasuruan secara berkala.

c. Kegiatan monitoring berkala yang dilaksanakan oleh Bidang Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik terbukti menjadi faktor kunci keberhasilan dalam ketercapaian publikasi data statistik sektoral. Dengan adanya pengawasan yang sistematis, publikasi data tidak hanya mencapai target, tetapi juga memberikan nilai tambah berupa kualitas, ketepatan, dan transparansi. Ke depan, mekanisme monitoring ini diharapkan terus diperkuat sebagai fondasi pengelolaan data yang modern dan berkelanjutan.

d. Penetapan SKB (Surat Keputusan Bersama) daftar data prioritas Tahun 2025. Dengan adanya kebijakan ini, publikasi data tidak hanya mencapai target, tetapi juga memberikan nilai tambah berupa keterpaduan, transparansi, dan akuntabilitas.

3.2 Realisasi Anggaran

Berdasarkan alokasi anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2025, pagu dan realisasi anggaran per program dan kegiatan dapat dirinci pada table 3.9 berikut:

Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.007.180.523	5.488.728.033	91,37
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.176.200	6.064.825	98,20
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.242.140.623	4.837.055.709	92,27
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11.242.100	11.083.263	98,59
1.4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16.223.600	13.261.800	81,74
1.5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	109.392.150	104.973.523	95,96

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	392.452.250	299.701.741	76,37
1.8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	229.553.600	216.587.172	94,35
2	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	2.152.479.099	1.967.809.332	91,42
2.1	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.152.479.099	1.967.809.332	91,42
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	7.634.579.90	7.483.174.391	98,02
3.1	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.634.579.900	7.483.174.391	98,02
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	156.717.266	149.983.968	95,70
4.1	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	156.717.266	149.983.968	95,70
5	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	59.341.100	58.570.131	98,70
5.1	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	59.341.100	58.570.131	98,70
TOTAL		**16.010.297.888**	**15.148.265.855**	**94,62**

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja - Fungsional) 31 Desember 2025

Pengukuran pencapaian kinerja anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pasuruan berdasarkan persentase rata-rata realisasi anggaran pada masing-masing program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada DPPA APBD tahun 2025. APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pasuruan tahun 2025 sebesar Rp16.010.297.888,- dan realisasi tahun 2025 Rp15.148.265.855,- mencapai 94,62%. Pencapaian realisasi anggaran tidak 100% dikarenakan terdapat sisa anggaran belanja pegawai yang tidak bisa direalisasikan dan sisa negosiasi pengadaan barang dan jasa maupun modal.

3.3 Inovasi

Adapun inovasi yang telah dilakukan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan adalah RW Net Memacu Pertumbuhan Eentrepreneur Baru. Inovasi RW Net merupakan program penyediaan akses internet gratis hingga tingkat RW yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Pasuruan. Adanya kesenjangan akses digital antar wilayah (digital divide) terutama pada lingkungan RW yang dihuni masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Keterbatasan akses internet menyebabkan rendahnya literasi digital dan minimnya peluang usaha digital. Salah satu peluang usaha digital tersebut yaitu dibidang layanan keuangan digital.

Metode pembaruan dilakukan dengan menyediakan akses internet gratis yang merata ke seluruh RW, diikuti sosialisasi dan kerja sama dengan Bank Jatim untuk membuka peluang usaha sebagai agen. Sebelumnya, warga kesulitan memulai usaha digital karena terbatasnya akses internet. Setelah adanya inovasi ini, warga dapat mengakses pelatihan, informasi, dan aplikasi Bank Jatim dengan mudah, sehingga terbentuk entrepreneur baru di tingkat RW.

Keunggulan inovasi ini adalah model kolaboratif OPD–Bank Jatim–Masyarakat yang belum pernah diterapkan sebelumnya, serta pemanfaatan infrastruktur digital pemerintah untuk mendorong lahirnya entrepreneur keuangan digital. RW Net juga memiliki kebaharuan sebagai layanan internet gratis yang langsung memicu terbentuknya agen layanan keuangan daerah.

3.4 Penghargaan

Adapun daftar penghargaan yang telah di terima Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan pada Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.10 berikut ini:

Tabel 3.10 Daftar Penghargaan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan

No	Nama Penghargaan	Penyelenggara
1.	Badan Publik Informatif	Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan

Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik berhasil mempertahankan prestasi sebagai “Kota Informatif”. Predikat ini menjadi bukti nyata atas komitmen kuat dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik, pengelolaan data yang transparan, serta pelayanan informasi

yang akuntabel bagi masyarakat. Dengan capaian nilai 92,61, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menunjukkan kualitas yang sangat baik dalam menyediakan akses informasi yang mudah, cepat, dan relevan. Sehingga masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari keterbukaan yang dijalankan pemerintah daerah.

Penghargaan tersebut tidak hanya menjadi simbol keberhasilan, tetapi juga menegaskan bahwa tata kelola informasi publik telah berjalan sesuai standar yang diharapkan. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat, inovasi digital terus berkembang, dan koordinasi antar perangkat daerah semakin solid. Semua pencapaian ini menjadikan kota yang informatif bukan sekadar gelar, melainkan cerminan dari kerja keras, dedikasi, dan sinergi yang terbangun antara pemerintah dan masyarakat.

Dengan penghargaan ini, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik semakin termotivasi untuk memperkuat peran sebagai penggerak utama keterbukaan informasi, sekaligus menjadikan Kota Pasuruan sebagai contoh bagi daerah lain dalam membangun pemerintahan yang transparan, modern, dan berkelanjutan.

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan tahun 2025 merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban kinerja yang telah ditetapkan oleh organisasi dan menjadi salah satu bahan evaluasi atas sasaran yang ingin dicapai dalam dokumen perencanaan strategis 2025-2029. Penyusunan laporan kinerja berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teksnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian kinerja merupakan perwujudan sinergi seluruh unit kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan dalam menghadapi berbagai tantangan di tahun 2025. Namun demikian, upaya penyempurnaan dan perbaikan indikator kinerja harus terus dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yang lebih berkualitas dengan target yang menantang. Selain itu, setiap risiko yang berpotensi menghambat pencapaian kinerja harus dapat diidentifikasi dan dimitigasi.

Secara umum dalam mendukung pencapaian sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan pada tahun 2025 mendapatkan alokasi dana APBD sebesar Rp16.010.297.888,- yang terealisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp15.148.265.855,- mencapai 94,62%. Secara keseluruhan dalam rangka pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi serta pelaksanaan kegiatan pembangunan, dapat dikatakan bahwa Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan *Berhasil* menyelenggarakan Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Bidang Statistik, dan Urusan Bidang Persandian. Hal ini tidak terlepas dari dukungan segenap pemangku kepentingan (Kepala Daerah dan unsur pimpinan di daerah, Dinas/Instansi terkait termasuk seluruh komponen internal Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, akuntabel dan inovatif sehingga mendapatkan umpan balik guna peningkatan kinerja yang akuntabel bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan pada periode mendatang.

4.2 Rekomendasi

Dalam rangka mendukung tercapainya program/kegiatan yang telah digariskan dalam RPJMD, khususnya untuk mewujudkan capaian pada Tahun 2026, maka langkah-langkah yang diambil sebagai solusi adalah sebagai berikut:

1. Menyusun kegiatan yang mendukung tercapaianya RPJMD;
2. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait pentingnya pengelolaan aplikasi dan integrasi digitalisasi;
3. Meningkatkan kematangan keterpaduan rencana dan anggaran SPBE;
4. Meningkatkan kematangan penerapan manajemen aset TIK;
5. Meningkatkan kematangan penerapan manajemen perubahan;
6. Meningkatkan kematangan pelaksanaan audit infrastruktur SPBE;
7. Meningkatkan kematangan pelaksanaan audit keamanan SPBE;
8. Membentuk Tim PPID level Kelurahan;
9. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan kepada PPID Pelaksana terkait penyampaian informasi berkala, serta merta, dan tersedia setiap saat di website dan media sosial;
10. Melaksanakan pembinaan bagi SDM kehumasan pada setiap Perangkat Daerah agar mampu dan terampil dalam menyajikan informasi pembangunan;
11. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan bagi Komunitas Informasi Masyarakat agar selalu bersemangat untuk update informasi pada masing-masing kelurahan;
12. Menyusun program-program radio yang lebih bervariatif agar lebih banyak mengundang pendengar radio Ramapati;
13. Menjalin kerja sama dan kemitraan dengan perangkat daerah, masyarakat dan media untuk mendukung publikasi informasi;

14. Mengoptimalkan implementasi dan koordinasi terkait time schedule dan peran Perangkat Daerah guna memperlancar pelaksanaan kegiatan perluasan ketersediaan dan updating data pada portal https://satudata.pasuruankota.go.id/ dalam rangka mewujudkan Satu Data Kota Pasuruan; dan
15. Meningkatkan permohonan rekomendasi statistik (Romantik) kepada Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan;

Pasuruan, 11 Februari 2026

Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik
Kota Pasuruan

IMAM SUBEKTI, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19730709 199201 1 001

LAMPIRAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

ESELON II

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IMAM SUBEKTI, S.SOS, MM
Jabatan : KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : ADI WIBOWO
Jabatan : WALI KOTA
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, 02 January 2025

Pihak Kedua,
WALI KOTA

ADI WIBOWO

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK

IMAM SUBEKTI, S.SOS, MM
NIP. 197307091992011001

PERJANJIAN KINERJA

ESELON II

NAMA	:	IMAM SUBEKTI, S.SOS, MM
NIP	:	197307091992011001
PANGKAT / GOL.	:	PEMBINA TINGKAT I / IV-B
JABATAN / KELAS JABATAN	:	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK / 14
PERANGKAT DAERAH	:	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
TAHUN	:	2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik	Indeks keterbukaan informasi publik	94.8
2	Terwujudnya satu data pembangunan Kota Pasuruan	Persentase data statistik yang terintegrasi	75
3	Meningkatnya Maturitas Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks tata kelola SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE	3.45
4	Meningkatnya Maturitas Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks layanan SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE	4.75

NO	PROGAM	ANGGARAN		KETERANGAN
1	Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	6.028.646.997,00	
2	Program Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Rp	1.892.302.006,00	
3	Program Program Aplikasi Informatika	Rp	7.811.057.700,00	
4	Program Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp	212.897.400,00	
5	Program Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp	81.657.400,00	
JUMLAH		**Rp**	**16.026.561.503,00**	

Pasuruan, 02 January 2025

Mengetahui,
Pejabat Atasan Langsung
WALI KOTA

ADI WIBOWO

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK

IMAM SUBEKTI, S.SOS, MM
NIP. 197307091992011001

PERJANJIAN KINERJA

ESELON II

NAMA : IMAM SUBEKTI, S.SOS, MM
NIP : 197307091992011001
PANGKAT / GOL. : PEMBINA TINGKAT I / IV-B
JABATAN / KELAS JABATAN : KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK / 14
PERANGKAT DAERAH : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
TAHUN : 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	OUTPUT / OUTCOME																												%
				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		JML						
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
1	Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik	Indeks keterbukaan informasi publik	Indeks																					94.8				94.8				
2	Terwujudnya satu data pembangunan Kota Pasuruan	Persentase data statistik yang terintegrasi	%	75		75		75		75		75		75		75		75		75		75		75		75		75				
3	Meningkatnya Maturitas Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks tata kelola SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE	Indeks																							3.45		3.45				
4	Meningkatnya Maturitas Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks layanan SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE	Indeks																							4.75		4.75				
CAPAIAN OUTPUT																																
% CAPAIAN KINERJA TIAP BULAN																																

NO	PROGAM	ANGGARAN		KETERANGAN
1	Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	6.028.646.997,00	
2	Program Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Rp	1.892.302.006,00	
3	Program Program Aplikasi Informatika	Rp	7.811.057.700,00	
4	Program Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp	212.897.400,00	
5	Program Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp	81.657.400,00	

JUMLAH	**Rp**	**16.026.561.503,00**	

Mengetahui,
Pejabat Atasan Langsung
WALI KOTA

ADI WIBOWO

Pasuruan, 02 January 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK

IMAM SUBEKTI, S.SOS, MM
NIP. 197307091992011001

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IMAM SUBEKTI, S.SOS, MM
Jabatan : KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : ADI WIBOWO
Jabatan : WALI KOTA
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, 18 September 2025

Pihak Kedua,
WALI KOTA

ADI WIBOWO

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK

IMAM SUBEKTI, S.SOS, MM
NIP. 197307091992011001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

ESELON II

NAMA	:	IMAM SUBEKTI, S.SOS, MM
NIP	:	197307091992011001
PANGKAT / GOL.	:	PEMBINA UTAMA MUDA/ IV-C
JABATAN / KELAS JABATAN	:	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK / 14
PERANGKAT DAERAH	:	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
TAHUN	:	2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SEBELUM	SESUDAH
1	Meningkatnya Tata Kelola Digitalisasi Pelayanan Publik	Nilai Domain Tata Kelola SPBE	3.45	3.42
2	Meningkatnya Layanan Digitalisasi Pelayanan Publik	Nilai Domain Layanan SPBE	4.75	4.73

NO	PROGAM	ANGGARAN		KETERANGAN
		SEBELUM	SESUDAH	
1	Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.772.749.447,00	Rp 6.007.180.523,00	
2	Program Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Rp 1.783.578.715,00	Rp 2.152.479.099,00	
3	Program Program Aplikasi Informatika	Rp 7.405.416.600,00	Rp 7.634.579.900,00	

NO	PROGAM	ANGGARAN				KETERANGAN
		SEBELUM		SESUDAH		
4	Program Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp	150.565.578,00	Rp	156.717.266,00	
5	Program Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp	57.341.100,00	Rp	59.341.100,00	
JUMLAH		Rp	**15.169.651.440,00**	Rp	**16.010.297.888,00**	

Pasuruan, 18 September 2025

Mengetahui,
Pejabat Atasan Langsung
WALI KOTA

ADI WIBOWO

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK

IMAM SUBEKTI, S.SOS, MM
NIP. 197307091992011001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

ESELON II

NAMA	:	IMAM SUBEKTI, S.SOS, MM
NIP	:	197307091992011001
PANGKAT / GOL.	:	PEMBINA UTAMA MUDA / IV-C
JABATAN / KELAS JABATAN	:	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK /14
PERANGKAT DAERAH	:	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
TAHUN	:	2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	OUTPUT / OUTCOME																												%
				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		JML					
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1	Meningkatnya Tata Kelola Digitalisasi Pelayanan Publik	Nilai Domain Tata Kelola SPBE	Nilai																							3.42		3.42				
2	Meningkatnya Layanan Digitalisasi Pelayanan Publik	Nilai Domain Layanan SPBE	Nilai																							4.73		4.73				
CAPAIAN OUTPUT																																
% CAPAIAN KINERJA TIAP BULAN																																

NO	PROGAM	ANGGARAN		KETERANGAN
		SEBELUM	SESUDAH	
1	Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.772.749.447,00	Rp 6.007.180.523,00	
2	Program Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Rp 1.783.578.715,00	Rp 2.152.479.099,00	
3	Program Program Aplikasi Informatika	Rp 7.405.416.600,00	Rp 7.634.579.900,00	

NO	PROGAM	ANGGARAN				KETERANGAN
		SEBELUM		SESUDAH		
4	Program Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp	150.565.578,00	Rp	156.717.266,00	
5	Program Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp	57.341.100,00	Rp	59.341.100,00	
JUMLAH		**Rp**	**15.169.651.440,00**	**Rp**	**16.010.297.888,00**	

Pasuruan, 18 September 2025

Mengetahui,
Pejabat Atasan Langsung
WALI KOTA

ADI WIBOWO

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK

IMAM SUBEKTI, S.SOS, MM
NIP. 197307091992011001

LAMPIRAN RENJA

RENCANA INDIATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA PASURUAN

Visi : PASURUAN ANUGRAH "Aktif Pelayanan Publiknya, Mandiri Ekonominya, Guyub Warganya dan Indah Kotanya"
Mis : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Merata Berbasis Digitalisasi

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPRASIONAL	2025		2026	2027	KETERANGAN
				TARGET	REALISASI	TARGET	TARGET	
	Tujuan: Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.	4,08	4,07	1,71	1,81	Target sesuai surat kementerian PAN dan RB No. B/ 66/PD.02/2025 tentang Pembinaan kepada Instansi Pemerintah pada Tahun 2025 dalam Rangka Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital sebagai Penguatan Kebijakan SPBE dan surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur No.000.7.2.2/14242/201.2/2025 tentang Pemutakhiran Penyelarasan Indikator Sasaran Pembangunan dan IUP pada RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 Tanggal 29 Juli 2025 bahwa target Pemutakhiran Penyelarasan Sasaran Pembangunan dan Indikator Utama Pembangunan masing-masing Kabupaten/Kota Tahun 2025-2030 disampaikan terlampir, untuk digunakan sebagai bahan penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025 – 2029
	Sasaran 1: Meningkatnya Tata Kelola Digitalisasi Pelayanan Publik	Nilai Domain Tata Kelola SPBE	Tata Kelola SPBE merupakan kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu	3,42	3,4	1,8	1,85	
	Sasaran 2: Meningkatnya Layanan Digitalisasi Pelayanan Publik	Nilai Domain Layanan SPBE	Layanan SPBE merupakan keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat	4,73	4,7	1,8	1,85	

Pasuruan, 18 Juni 2026

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Kota Pasuruan

IMAM SUBEKTI, S.Sos, MM
NIP. 19730709 199201 1 001

LAMPIRAN LKJIP

LAPORAN EFISIENSI SUMBER DAYA PADA PENCAPAIAN TARGET KINERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PAGU AWAL ANGGARAN	PAGU EFISIENSI/PAK	TARGET PERUBAHAN KINERJA	REALISASI PERUBAHAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN
1	Meningkatnya Tata Kelola Digitalisasi Pelayanan Publik	Nilai Domain Tata Kelola SPBE	3,42	3,40	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	90,00	96,43	6.028.646.997	6.007.180.523	90,00	96,43	5.488.728.033
					Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	80,00	100,00	12.682.000	6.176.200	80,00	100,00	6.064.825
					Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7,00	7,00	8.522.700	3.947.700	7,00	7,00	3.897.060
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6,00	6,00	4.159.300	2.228.500	6,00	6,00	2.167.765
					Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	80,00	100,00	5.017.146.847	5.242.140.623	80,00	100,00	4.837.055.709
					Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34,00	34,00	4.984.742.247	5.215.273.323	36,00	34,00	4.810.233.059
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13,00	13,00	32.404.600	26.867.300	13,00	13,00	26.822.650
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	70,00	100,00	14.694.700	11.242.100	70,00	100,00	11.083.263
					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2,00	2,00	2.359.300	1.032.500	2,00	2,00	920.800
					Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4,00	4,00	12.335.400	10.209.600	4,00	4,00	10.162.463
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	70,00	75,00	41.000.000	16.223.600	70,00	75,00	13.261.800

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PAGU AWAL ANGGARAN	PAGU EFISIENSI/PAK	TARGET PERUBAHAN KINERJA	REALISASI PERUBAHAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN
					Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4,00	4,00	5.000.000	2.223.600	4,00	4,00	2.161.800
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8,00	1,00	36.000.000	14.000.000	2,00	1,00	11.100.000
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	85,00	100,00	215.210.100	109.392.150	85,00	100,00	104.973.523
					Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2,00	2,00	7.000.000	6.300.000	2,00	2,00	6.265.325
					Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4,00	4,00	8.700.000	4.283.500	4,00	4,00	4.252.377
					Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2,00	2,00	2.204.400	1.102.200	2,00	2,00	1.092.000
					Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1,00	1,00	10.011.600	4.105.800	1,00	1,00	449.998
					Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4,00	4,00	11.334.400	5.620.800	4,00	4,00	4.983.663
					Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125,00	60,00	175.959.700	87.979.850	60,00	60,00	87.930.160
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	85,00	100,00	398.734.150	392.452.250	85,00	100,00	299.701.741
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12,00	12,00	4.990.000	2.490.000	12,00	12,00	2.490.000
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	12,00	178.586.200	178.586.200	12,00	12,00	131.329.172
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00	12,00	215.157.950	211.376.050	12,00	12,00	165.882.569
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	70,00	100,00	329.179.200	229.553.600	70,00	100,00	216.587.172
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1,00	1,00	44.870.000	36.396.000	1,00	1,00	32.739.223
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14,00	14,00	151.060.000	122.368.000	14,00	14,00	117.702.115
					Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	49,00	31,00	33.250.000	20.790.000	31,00	31,00	20.262.328

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PAGU AWAL ANGGARAN	PAGU EFISIENSI/PAK	TARGET PERUBAHAN KINERJA	REALISASI PERUBAHAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1,00	1,00	99.999.200	49.999.600	1,00	1,00	45.883.506
					Program Aplikasi Informatika	Persentase layanan jaringan yang ditindaklanjuti	100,00	100,00	7.811.057.700	7.634.579.900	100,00	100,00	7.483.174.391
						Persentase Peningkatan Aplikasi yang terintegrasi	69,00	75,00			69,00	75,00	
						Persentase pengamanan informasi dan dokumen publik	85,00	100,00			85,00	100,00	
					Kegiatan Pengelolaan egovernment di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase ketercapaian pengelolaan egovernment di lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota	85,00	100,00	7.811.057.700	7.634.579.900	85,00	100,00	7.483.174.391
					Koordinasi Penyusunan dan/atau Reviu Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	1,00	1,00	130.196.500	94.957.000	1,00	1,00	91.663.941
					Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang Sesuai Dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	10,00	43,00	1.084.921.800	1.352.417.100	10,00	43,00	1.304.004.763
					Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	418,00	469,00	6.595.939.400	6.187.205.800	418,00	469,00	6.087.505.687
					Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase layanan keamanan informasi dan persandian	100,00	100,00	81.657.400	59.341.100	100,00	100,00	58.570.131
					Kegiatan Penyeleng garaan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi yang tersertifikasi elektronik di lingkungan pemerintah daerah	9,00	10,00	81.657.400	59.341.100	9,00	10,00	58.570.131
					Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	41,00	41,00	81.657.400	59.341.100	41,00	41,00	58.570.131
2	Meningkatnya Layanan Digitalisasi Pelayanan Publik	Nilai Domain Layanan SPBE	4,73	4,70	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi Perangkat Daerah yang di unggah	80,00	87,60	1.892.302.006	2.152.479.099	80,00	87,60	1.967.809.332
						Persentase informasi yang di publikasikan melalui media	90,00	91,01			90,00	91,01	
						Persentase informasi berbasis masyarakat yang di bina	85,00	63,17			85,00	63,17	
					Kegiatan Pengelolaan Informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persentase informasi pembangunan yang di publikasikan melalui media massa tepat waktu	85,00	91,01	1.892.302.006	2.152.479.099	85,00	91,01	1.967.809.332
					Realisasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan	4,00	4,00	712.896.500	867.892.500	4,00	4,00	824.864.472

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PAGU AWAL ANGGARAN	PAGU EFISIENSI/PAK	TARGET PERUBAHAN KINERJA	REALISASI PERUBAHAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN
						3. aktif dalam kegiatan relasi media							
					Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	10,00	20,17	26.776.900	15.450.700	10,00	20,17	14.654.516
					Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	6,00	2,00	288.754.000	240.351.709	6,00	2,00	191.817.479
					Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	2,00	2,00	376.921.700	371.626.700	2,00	2,00	371.328.198
					Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	2,00	2,00	486.952.906	657.157.490	2,00	2,00	565.144.667
					Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data statistik sektoral yang di publikasi	80,00	97,80	212.897.500	156.717.266	80,00	97,80	149.983.968
					Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis data yang disusun dalam Profil pembangunan daerah	33,00	33,00	212.897.500	156.717.266	33,00	33,00	149.983.968
						Persentase data statistik sektoral yang diunggah di website	75,00	99,25			75,00	99,25	
						Jumlah jenis data yang disusun dalam data pokok pembangunan daerah	33,00	33,00			33,00	33,00	
					Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase Kegiatan Statistik Sektoral yang rilis tepat waktu	75,00	97,80	37.065.600	22.293.298	75,00	97,80	20.793.187
					Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai Prinsip Satu Data	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	2,00	2,00	175.831.900	134.423.968	2,00	2,00	129.190.781

Penjelasan:

1. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, serta menindaklanjuti Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor SE 900.1.3/6629.A/SJ dan SE/MK.07/2024 mengenai pelaksanaan anggaran transfer ke daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kota telah melakukan penyesuaian anggaran melalui mekanisme refocusing. Refocusing dilakukan terhadap program/kegiatan dengan nilai sebesar Rp856.910.063 dengan pagu anggaran awal sebesar Rp16.026.561.503 mengalami penyesuaian menjadi Rp15.169.651.440. Penyesuaian ini dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Wali Kota Nomor

903.1.1.4/276/423.201/2025 tentang Rencana Pergeseran Anggaran. Pergeseran anggaran dilakukan sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia dalam rangka efisiensi belanja pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

- Membatasi belanja kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, dan seminar/FGD;
- Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50%;
- Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Satuan Harga Regional;
- Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur;
- Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja layanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya;
- Lebih efektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga; dan
- Melakukan penyesuaian belanja APBD TA 2025 bersumber dari TKD

2. Pada bulan September Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kota melakukan perubahan anggaran dengan nilai sebesar Rp840.646.448. Perubahan ini menyebabkan pagu anggaran bergeser dari Rp15.169.651.440 menjadi Rp16.010.297.888. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk mengakomodasi kebutuhan belanja tambahan yang muncul dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Perubahan anggaran mencakup beberapa rincian belanja sebagai berikut:
    - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ada Penambahan gaji pokok dan tunjangan, termasuk tunjangan PPh dan tunjangan tambahan penghasilan, dikarenakan adanya kenaikan pangkat dan kenaikan berkala bagi sejumlah pegawai;
    - Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Relasi Media terdapat penambahan Belanja publikasi dan media

berupa penambahan belanja spanduk, baliho, kegiatan jumpa pers, serta publikasi media cetak, mengingat tingginya permintaan publikasi dan keterbatasan pagu sebelumnya;

- Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik terdapat penambahan Belanja publikasi yang bersumber dari DBHCHT berupa tambahan belanja publikasi cetak dan online yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; dan
- Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah terdapat penambahan Belanja sewa aset tidak berwujud berupa lisensi email dan layanan cloudflare untuk mendukung kebutuhan teknologi informasi pemerintahan.

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik
Kota Pasuruan

IMAM SUBEKTI, S.Sos, MM
NIP. 19730709 199201 1 001